



STUDI EVALUASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARAWANG MENGUNAKAN *ALTERNATIVE SERVICE DELIVERY* FRAMEWORK

Kristian Widya Wicaksono¹

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
kristian.widya@unpar.ac.id

Jeffri Yosep Simanjorang²

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
jeffriys@unpar.ac.id

Dinda Tresya Cantika³

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
dindatresyac31@gmail.com

Amelia Augustine Aan Putri⁴

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
aapamelia2384@gmail.com

Dinda Biavinca⁵

Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
dinda.bia28@gmail.com

Abstrak

Evaluasi pembangunan merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program sektor publik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Karawang yang bertujuan menekan angka pengangguran terbuka dan mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan survei pada November 2023 dengan melibatkan 400 responden warga Kabupaten Karawang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka *Alternative Service Delivery Framework* (ASDF) yang mencakup enam dimensi: kepentingan umum, peran pemerintah, keselarasan yurisdiksi, kemitraan eksternal, prinsip bisnis, dan keterjangkauan. Temuan penelitian menunjukkan skor rata-rata 3,27 (dari skala 5). Hasil penelitian mengindikasikan adanya beberapa ruang perbaikan di dalam program pembangunan seperti peningkatan inklusivitas program, penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sinergi dengan mitra.

Kata kunci: evaluasi program, kemiskinan, ketenagakerjaan, ASDF, Kabupaten Karawang

Abstract

Development evaluation serves as a critical instrument for assessing public sector programme effectiveness, particularly in poverty reduction and employment expansion initiatives. This study examines the implementation of development programmes in Karawang Regency, Indonesia, designed to reduce open unemployment rates and decrease poverty levels in



accordance with the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Employing a quantitative approach, the research conducted a survey in November 2023 involving 400 residents of Karawang Regency. Data analysis was performed using descriptive statistics within the Alternative Service Delivery Framework (ASDF), incorporating six key dimensions: public interest test, government role, jurisdictional alignment, external partnership, business principles, and affordability. The findings reveal an average score of 3.27 (on a 5-point scale), indicating several areas requiring programme improvement. These include enhancing programme inclusivity, refining coordination mechanisms, and strengthening multi-stakeholder collaboration.

Keywords: programme evaluation, poverty alleviation, employment generation, ASDF, Karawang Regency

Pendahuluan

Evaluasi pembangunan merupakan tema penting dalam kajian sektor publik. Evaluasi dapat membantu performa pembangunan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan program pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga dampak pembangunan. Berbagai dimensi tersebut menjelaskan betapa krusial evaluasi pembangunan. Evaluasi juga dapat dilakukan dalam banyak bidang, hingga akhirnya menuntut banyak spesialis dari berbagai dimensi untuk mencapai dampak yang lebih optimal (Ofir, 2013). Selain kompleksitas tersebut, banyak program pembangunan membutuhkan alat evaluasi yang lebih relevan seiring perkembangan yang terjadi (Van Drooge & Spaapen, 2022).

Dari perspektif lain, masyarakat sebagai pembayar pajak berharap dana yang mereka kontribusikan dialokasikan untuk program-program pembangunan yang berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dampak positif bisa tercapai ketika penyelenggaraan pembangunan berhasil. Namun, ketika pembangunan tidak berjalan sesuai harapan, maka evaluasi dapat menjelaskan akuntabilitas, realitas, dan informasi lainnya yang memengaruhi capaian pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang bermaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebuah program pembangunan.

Berbagai artikel telah memuat usaha evaluasi pembangunan dalam berbagai konteks. Misalnya, artikel D'Adamo & Gastaldi (2023) menilai bagaimana kebijakan pembangunan berbagai daerah di Italia berimplikasi pada pendekatan yang lebih spesifik dan menyesuaikan karakteristik sebuah wilayah. Selanjutnya, artikel Wotela (2017) mengemukakan bahwa dalam sebuah evaluasi pembangunan, penting untuk mencermati kompleksitas interaksi antar komponen yang menjadi bagian dari sebuah pembangunan. Kompleksitas lainnya disampaikan pula pada artikel Douxchamps et al., (2017) yang berpendapat bahwa berbagai alat evaluasi perlu dioptimalkan untuk mendapat hasil evaluasi yang menyeluruh. Lebih lanjut, pendapat lainnya mengutarakan pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam sebuah evaluasi untuk membantu memetakan berbagai perspektif dan berbagai kebutuhan (Brown et al., 2018).

Evaluasi dapat membantu berbagai usaha pembangunan, seperti mengumpulkan data untuk mencermati *input*, *output*, *outcome*, hingga *impact*



program. Data tersebut baik untuk diketahui berbagai pemangku kepentingan untuk membantu usaha pengambilan keputusan berbasis bukti untuk meningkatkan dampak sebuah proyek (Amin et al., 2023). Sejalan dengan pandangan tersebut, evaluasi diperlukan untuk proyeksi, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program agar lebih optimal. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang direncanakan, sebagaimana penelitian Aly et al., (2022) yang menekankan perlunya evaluasi guna memahami perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan suatu program pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Karawang, terdapat fakta menarik yang mendasari pentingnya evaluasi pembangunan. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018, agenda prioritas pembangunan daerah mencakup pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, berdasarkan data yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin di Karawang justru terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 9,61%, meningkat menjadi 11,52% pada 2020, dan kembali naik menjadi 11,83% pada 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan di Karawang belum berhasil mengatasi peningkatan pengangguran.

Selain itu, persentase penduduk miskin juga mengalami tren peningkatan, yakni dari 7,39% pada 2019 menjadi 8,26% pada 2020, dan kembali meningkat menjadi 8,95% pada 2021 (RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026). Data tersebut mengindikasikan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Karawang belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Kondisi ini berkorelasi dengan dua program prioritas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang 2021-2026, yaitu program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif, serta program penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dari beberapa penjelasan di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap program pembangunan di Kabupaten Karawang dalam menekankan tingkat kemiskinan. Studi ini hendak berfokus pada usaha menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin dengan cara menghimpun persepsi masyarakat terhadap program pembangunan di Kabupaten Karawang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Kerangka teori

Evaluasi Program

Evaluasi dapat dipahami sebagai sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan (OECD, 2010). Hasil evaluasi dapat membantu usaha pengambilan keputusan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi alternatif yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan (OECD, 2025). Kedua



penjelasan tersebut menggambarkan betapa pentingnya evaluasi dalam sebuah program, termasuk program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Evaluasi berfokus pada efek aktual yang terjadi setelah sebuah intervensi dilakukan. Hal ini sejalan dengan pengertian evaluasi program yang dikemukakan oleh Rist (2019) yang menekankan pada proses menilai hasil atau dampak program melalui cara metodologis yang ketat. Artinya, evaluasi dilakukan secara retrospektif untuk menelusuri konsekuensi-konsekuensi yang terjadi setelah sebuah program dilaksanakan (Rist, 2019). Dalam perkembangannya, evaluasi program juga dapat ditinjau dalam perspektif yang berbeda. Pada perspektif baru ini dikemukakan bahwa evaluasi tidak ditempatkan di tahap akhir sebagai upaya yang retrospektif.

Evaluasi bisa dilakukan pada semua tahapan proses. Jenis-jenis evaluasi ini mencakup analisis perbandingan awal-akhir (*front-end analysis*), penilaian evaluabilitas, evaluasi proses, evaluasi efektivitas atau dampak, pemantauan program dan masalah, dan meta-evaluasi atau evaluasi sintesis (Rist, 2019). Dalam konteks Indonesia, penelitian Akhmadi (2016) menjelaskan variasi jenis dan periode laporan pada lima kementerian yang ada di Indonesia dan merekomendasikan proses evaluasi untuk secara paralel dilakukan pada fase perencanaan, penganggaran, dan implementasi kegiatan. Selanjutnya, penelitian lainnya menemukan berbagai permasalahan dalam penerapan sebuah program (Daga & Prasetyo, 2023), dan kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan penerima manfaat (Paundria & Prasetyo, 2024).

Vedung (2017) mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan penilaian retrospektif yang hati-hati atas manfaat, nilai, dan nilai administrasi, luaran, dan hasil dari intervensi pemerintah, yang dimaksudkan untuk berperan dalam situasi tindakan praktis di masa depan. Pengertian ini menegaskan bahwa evaluasi program merupakan sebuah upaya retrospektif yang secara hati-hati dilakukan untuk mengetahui dampak dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah (Vedung, 2017). Pengertian lainnya dikemukakan oleh Mertens dan Wilson (2019) yang menyatakan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan ilmu sosial yang diarahkan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi tentang cara kerja dan efektivitas program sosial. Definisi ini menegaskan bahwa evaluasi terkait dengan informasi yang berhubungan dengan program sosial. Berlandaskan uraian sejumlah konsep evaluasi program di atas, maka para peneliti sepakat untuk menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Vedung (2017) yang menyatakan bahwa evaluasi program merupakan penilaian retrospektif yang hati-hati terhadap utilitas, nilai dan nilai administrasi, keluaran dan hasil dari kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memainkan peran dalam situasi operasional praktis di masa depan (Mertens & Wilson, 2019).

Evaluasi program memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks pembangunan, karena ia memberikan dasar bagi pengambil keputusan untuk menilai kelayakan dan efektivitas suatu program. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto dan Jabar (2008), tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu program mencapai tujuan, yang dilakukan melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data dan penilaian terhadap implementasi kegiatan. Oleh karena itu, evaluasi program tidak hanya melibatkan proses pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis terhadap keterlaksanaan kegiatan program serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi menjadi sarana untuk menilai apakah program yang



dilaksanakan sudah sesuai rencana dan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh Munthe (2015), aktor utama dalam evaluasi adalah pengambil keputusan yang akan menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan arah kebijakan program, termasuk apakah program tersebut perlu dilanjutkan, dihentikan, atau direvisi. Selain itu, tim evaluasi yang terdiri dari para ahli atau evaluator juga memiliki peran dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta menyusun laporan evaluasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Dalam konteks ini, staf pelaksana program dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan juga memberikan informasi yang berharga terkait dengan implementasi program di lapangan.

Dampak yang dihasilkan dari evaluasi program sangat bergantung pada sejauh mana hasil evaluasi dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan program lebih lanjut. Sejalan dengan pandangan Munthe (2015), evaluasi dapat menghasilkan dampak berupa keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan suatu program berdasarkan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan efektivitasnya. Selain itu, evaluasi juga dapat memberikan masukan terkait dengan perbaikan dalam pelaksanaan program, misalnya dengan mengganti teknik yang kurang efektif atau memperbaiki prosedur yang ada. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil, tetapi juga sebagai alat untuk perbaikan dan pengembangan program, baik dalam hal alokasi dana, strategi pelaksanaan, maupun metode yang digunakan.

Alternative Service Delivery Framework

Seiring berjalannya waktu, evaluasi program mengalami perubahan yang signifikan dalam konsep dan fungsi. Perubahan tersebut awalnya dirancang untuk menilai alokasi sumber daya secara efektif dan efisien untuk menjadi disiplin yang mencakup keseluruhan pengembangan program. Namun, keterbatasan sumber daya serta masalah sosial dan ekonomi memerlukan sebuah prioritas dalam penanganan program. Akibatnya, penilaian efisiensi biaya dan keterlibatan masyarakat tetap menjadi aspek penting dalam penelitian evaluasi. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak masalah publik secara global, diperlukan langkah proaktif dengan instrumen baru, seperti efektivitas dan akuntabilitas dalam evaluasi. Terdapat pendekatan evaluasi yang tidak hanya menilai keberhasilan program tetapi juga mengidentifikasi penyebab kegagalannya. Salah satu instrumen/pendekatan yang dapat digunakan adalah *Alternative Service Delivery Framework* (ASDF) atau kerangka pemberian layanan alternatif (Shah, 2020).

ASDF muncul pada tahun 1990-an sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Pendekatan ini menawarkan diversifikasi dalam penyampaian layanan dengan mengadopsi mekanisme seperti *outsourcing*, kemitraan publik-swasta, dan partisipasi komunitas. Beberapa negara seperti Kanada dan Inggris menjadi pelopor dalam penerapan ASDF di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Munculnya ASDF tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan birokrasi tradisional dan mendorong keterlibatan sektor lain dalam pelayanan publik, dengan memanfaatkan prinsip pasar dan inovasi manajerial, ASDF menjadi model yang lebih fleksibel



dibandingkan pendekatan birokratis sebelumnya, memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Anwar Shah (2020) menjelaskan bahwa pendekatan ASDF memiliki peran untuk mewakili proses konsultatif dan partisipatif yang dinamis dari evaluasi sektor publik. Proses evaluasi ini menginformasikan reformasi dan restrukturisasi sektor publik untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada masyarakat melalui berbagai fungsi. Peran dan tanggung jawab pemerintah ditinjau kembali untuk setiap fungsi. Terdapat enam (6) kriteria penilaian evaluasi dalam menggunakan kerangka ASDF; yaitu (1) *public interest test* (uji kepentingan umum) yang menilai apakah suatu program termasuk ke dalam layanan kepentingan publik; (2) *role of government* (uji peran pemerintah) yang menentukan apakah pemerintah memiliki peran yang sah untuk berpartisipasi dalam program tersebut; (3) *jurisdictional alignment test* (uji keselarasan yurisdiksi) yang mengevaluasi kesesuaian penugasan antara pemerintah dengan lembaga terkait; (4) *external partnership test* (uji kemitraan eksternal) yang menilai kemungkinan desentralisasi program atau layanan ke sektor di luar pemerintah; (5) *business principal test* (uji prinsip bisnis) memeriksa apakah program sudah memenuhi prinsip bisnis yang mengacu pada efisiensi atau tidak; dan (6) *affordability test* (uji keterjangkauan) untuk mengevaluasi keterjangkauan program dalam batas anggaran atau fiskal, serta mempertimbangkan terminasi jika tidak layak secara fiskal.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pemilihan metode ini dilakukan dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan atau menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik, sejalan dengan pandangan Silalahi (2017). Menurut Creswell (2009), metode ini digunakan untuk menguji teori dengan mendeskripsikan atau menelusuri hubungan antar variabel yang diukur. Data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jenis penelitian yang diterapkan adalah survei non-eksperimental. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menangkap persepsi masyarakat terhadap program pembangunan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran, yang selaras dengan kerangka teori ASDF.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen, literatur, dan laporan tertulis yang mendukung penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup dengan alternatif jawaban yang telah disediakan untuk mengukur sikap responden terhadap evaluasi program. Dengan populasi Kabupaten Karawang sejumlah 2.505.247 jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022), penelitian ini menggunakan tabel Isaac dan Michael untuk menentukan ukuran sampel. Penelitian ini akhirnya menghimpun 400 responden yang merupakan warga dengan domisili Kabupaten Karawang.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan variabel penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dikarenakan



variabel yang diteliti merupakan satu variabel yaitu evaluasi program. Dalam penelitian ini, tipe statistik yang digunakan mencakup distribusi frekuensi, kecenderungan pusat, dan penyebaran (dispersi).

Evaluasi program dalam penelitian ini merupakan penelitian retroaktif yang dilakukan secara cermat terhadap utilitas, nilai, administrasi, serta keluaran dan hasil kebijakan pemerintah yang berperan dalam implementasi operasional di masa depan. Untuk menganalisis evaluasi program secara mendalam, penelitian ini menggunakan instrumen ASDF yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu uji kepentingan umum, uji peran pemerintah, uji keselarasan yurisdiksi, uji kemitraan eksternal, uji prinsip bisnis, dan uji keterjangkauan. Instrumen ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam konteks penerapan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Dari keenam aspek ASDF tersebut, penelitian ini mengembangkan 12 pertanyaan sebagaimana tertuang pada tabel 1.

Tabel 1. Instrumen ASDF

No.	Aspek	Pertanyaan
P1	Uji Kepentingan Umum	Tingkat kesesuaian berbagai program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan kepentingan publik.
P2		Tingkat inklusivitas (pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi perbedaan dan keberagaman) dalam program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Karawang.
P3	Uji Peran Pemerintah	Tingkat penerimaan masyarakat terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
P4		Tingkat kekuatan landasan hukum dalam mendukung keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
P5	Uji Keselarasan Yurisdiksi	Tingkat kesesuaian program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang menjadi <i>leading sector</i> pelaksanaan kedua program tersebut.
P6		Kekuatan payung hukum yang mengatur penugasan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
P7	Uji Kemitraan Eksternal	Tingkat beban kerja pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
P8		Tingkat keterlibatan mitra non-pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di



Kabupaten Karawang.

P9	Uji Prinsip Bisnis	Tingkat efisiensi program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Karawang.
P10		Tingkat pengelolaan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Karawang.

P11	Uji Keterjangkauan	Tingkat ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
P12		Tingkat kecukupan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menunjang pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang diterapkan adalah Skala Likert, yang merupakan teknik pemeringkatan untuk sikap, pendapat, dan tanggapan individu atau kelompok terkait topik yang diteliti. Skala Likert terdiri dari beberapa pertanyaan dengan kategori respon, di mana nilai atau skor responden dihitung dengan menjumlahkan tanggapan yang telah diberikan. Pada pengukuran skala Likert ini, 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut data Badan Pusat Statistik (2021), jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada 2020 diproyeksikan mencapai 2.439.085 jiwa, terdiri dari 1.236.052 laki-laki dan 1.203.033 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada 2020 sebesar 0,87%. Dengan luas wilayah 1.753,27 km² dan kepadatan penduduk mencapai 1.332 jiwa, Kecamatan Karawang Barat memiliki populasi tertinggi (173.210 jiwa atau 7,31%), sedangkan Kecamatan Tegalwaru memiliki populasi terendah (39.269 jiwa atau 1,66%). Rasio ketergantungan Kabupaten Karawang meningkat dari 46,18% pada 2016 menjadi 46,28% pada 2020, hal ini menunjukkan beban penduduk usia produktif yang semakin berat dalam menanggung penduduk non-produktif (RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026).

Penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran rata-rata per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai minimal untuk memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per hari, mencakup 52 jenis bahan pangan. GKNM adalah kebutuhan minimal untuk non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, terdiri dari 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 di pedesaan (RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026, (2021).

Di Kabupaten Karawang, jumlah penduduk miskin menurun dari 230.600 jiwa (2016) menjadi 173.660 jiwa pada tahun 2019, lalu naik menjadi 195.410 jiwa pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin juga turun dari 10,07% pada tahun 2016 menjadi 7,39% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 8,26% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik Kabupaten



Karawang, 2024). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan GK. Di Karawang, P1 turun dari 1,87 pada tahun 2016 menjadi 1.06 pada tahun 2019, lalu naik menjadi 1,28 pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Karawang, 2023). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Karawang, P2 turun dari 0,53 pada tahun 2016 menjadi 0,24 pada tahun 2019, lalu naik menjadi 0,25 pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2023).

Industri di Kabupaten Karawang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga memicu persaingan ketat dalam dunia kerja akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Oleh karena itu, investasi substansial dan berkelanjutan dalam pengembangan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Data menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang menurun dari 1.128.724 jiwa pada 2018 menjadi 1.121.195 jiwa pada 2019. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sempat turun 0,5% pada 2018 dibandingkan 2017, tetapi meningkat drastis menjadi 11,52% pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak industri padat karya melakukan PHK (RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2026). Berdasarkan data BPS, TPT mengalami tren penurunan dari 9,61% pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2021) menjadi 8,16% pada Februari 2018. Selama lima tahun terakhir walaupun secara persentase terjadi penurunan, secara absolut jumlah pengangguran terbuka masih tergolong tinggi yakni 1,86 juta orang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja baru serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Tabel 2. Identitas Responden

Kategori	Sub kategori	Frekuensi	%
Jenis kelamin	Laki-laki	145	36,25
	Perempuan	255	63,75
Usia	17-20	58	14.50
	21-25	147	36.75
	26-30	126	31.50
	31-35	52	13.00
	36-40	9	2.25
	41-45	3	0.75
	46-50	4	1.00
	51-55	1	0.25
Tingkat pendidikan terakhir	Tidak sekolah	1	0.25
	Sekolah Dasar	1	0.25
	Sekolah Menengah Pertama	13	3.25
	Sekolah Menengah Atas	233	58.25



Diploma Tiga	21	5.25
Sarjana	125	31.25
Magister	6	1.50

Hasil analisis perhitungan variabel evaluasi program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Evaluasi Program

Statistik	Nilai
Jumlah responden	400
Data hilang	0
Rata-rata	3.27
Median	3.00
Modus	3.00
Simpangan Baku	1.17
Nilai Minimum	12
Nilai Maksimum	60

Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel evaluasi program memiliki nilai rata-rata sebesar 3,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,17. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 12,00 dan nilai maksimum sebesar 60,00 sedangkan nilai median sebesar 3,00 sehingga dapat diartikan variabel evaluasi program mempunyai nilai yang cukup rendah.

Tabel 4. Hasil survei ASDF

Aspek	Pertanyaan	Persentasi					Mean	SD
		Sangat Rendah	Rendah	Cukup Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi		
Uji Kepentingan Umum	P1	7.00	19.75	31.75	24.25	17.25	3.25	1.16
	P2	6.50	21.00	36.00	20.75	15.75	3.18	1.13
Uji Peran Pemerintah	P3	5.75	19.25	27.5	27	20.5	3.37	1.17
	P4	8	19	28	24.25	20.75	3.31	1.22
Uji Keselarasan Yurisdiksi	P5	6.25	20.75	32.5	21.5	19	3.26	1.17
	P6	8.5	20.25	29	24.25	18	3.23	1.21
Uji Kemitraan Eksternal	P7	7	15.75	34.25	25.5	17.5	3.31	1.14
	P8	5.5	18.25	31.25	26	19	3.35	1.14
Uji Prinsip Bisnis	P9	8.5	19	31.5	23.25	17.75	3.23	1.19
	P10	9.25	23	30.75	19	18	3.14	1.22
Uji Keterjangkauan	P11	7.5	16.75	31.25	27.25	17.25	3.30	1.16
	P12	4.25	18.75	32.25	27	17.75	3.35	1.10



Program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Karawang masih belum optimal dalam menjangkau kepentingan publik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat tergolong cukup rendah, meskipun program ini merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai Peraturan Bupati Karawang No. 59 Tahun 2018. Selain itu, tingkat inklusivitas program juga masih rendah, yang tercermin dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2020, yaitu 195.410 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,52% (BPS Karawang, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa manfaat program belum merata bagi seluruh kelompok sasaran.

Peran pemerintah daerah dalam program ini juga belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, dengan tingkat penerimaan yang tergolong cukup rendah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun 2019 hingga 2021, yang mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah belum efektif (BPS, 2022). Kelemahan lain yang ditemukan adalah kurangnya kekuatan landasan hukum dalam mendukung peran pemerintah daerah, meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2021 yang mengatur kedudukan dan tugas Bappeda (Bappeda Karawang, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program.

Selain itu, program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini menghambat koordinasi dan efektivitas program, sehingga diperlukan penataan ulang agar tugas masing-masing lembaga lebih jelas dan terarah. Kelemahan serupa juga ditemukan dalam aspek kekuatan payung hukum yang mengatur penugasan OPD, yang masih tergolong cukup rendah, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan untuk memastikan tugas dan wewenang lembaga terkait lebih sinkron (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Dari segi implementasi, beban kerja pemerintah daerah dalam menjalankan program ini tergolong cukup rendah, yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah desentralisasi program kepada sektor di luar pemerintah, terutama dalam kerja sama dengan mitra non-pemerintah. Saat ini, keterlibatan pihak swasta, seperti kerja sama dengan PT Sharp Electronics Indonesia, masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan agar program dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya (Dinas Tenaga Kerja Karawang, 2022).

Efisiensi program ini juga masih cukup rendah, baik dari segi manajemen maupun pengelolaan anggaran. Meskipun alokasi anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp21,1 miliar, realisasinya masih belum optimal, dengan persentase penyerapan sekitar 65,6% untuk pengentasan kemiskinan dan 68,6% untuk penciptaan lapangan kerja (BPK Karawang, 2023). Pengelolaan program yang bersih dan akuntabel juga masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan restrukturisasi atau perbaikan dalam tata kelola program. Selain itu, tingkat ketersediaan dan kecukupan anggaran dinilai masih rendah, yang menunjukkan bahwa program ini mungkin tidak terjangkau dalam batasan fiskal yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang untuk menentukan apakah program ini perlu diteruskan atau disesuaikan agar lebih efektif.



Kesimpulan

Penelitian evaluasi program di Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang telah dilaksanakan. Rekomendasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mempercepat efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja guna menekan peningkatan tingkat pengangguran terbuka serta jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang.

Pendekatan evaluasi yang digunakan tidak hanya berfokus pada keberhasilan program, tetapi juga mengkaji faktor-faktor penyebab kegagalannya. Salah satu instrumen yang digunakan dalam evaluasi ini adalah ASDF yang berfungsi sebagai pendekatan konsultatif dan partisipatif dalam menilai efektivitas kebijakan sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Karawang belum mampu secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan enam kriteria evaluasi dalam kerangka ASDF yang diuji terhadap 400 responden, diperoleh nilai mean 3,27 dan median sebesar 3,00 yang mengindikasikan bahwa evaluasi program masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan di berbagai aspek agar program ini dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya.

Referensi

- Akhmadi. (2016). *Monitoring and evaluation of development programs in five ministries: A study on the system and implementation* (B. Ahrens, Ed.; M. Mulyana & G. Handoko, Trans.). SMERU Research Institute.
- Aly, E., Elsayah, S., & Ryan, M. J. (2022). A review and catalogue to the use of models in enabling the achievement of sustainable development goals (SDG). *Journal of Cleaner Production*, 340, 130803. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130803>
- Amin, H., Scheepers, H., & Malik, M. (2023). Project monitoring and evaluation to engage stakeholders of international development projects for community impact. *International Journal of Managing Projects in Business*, 16(2), 405–427. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-02-2022-0043>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Jawa Barat, Tahun 2022* (2025-03-16).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (3 Desember 2021). *TPAK DAN TPT, 2019-2021*. Diakses pada 7 April 2025, dari <https://karawangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTkjMg==/tpak-dan-tpt.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (6 Oktober 2023). *Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2004-2022*. Diakses pada 7 April 2025, dari <https://karawangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg3IzE=/indeks-keparahan-kemiskinan-kab-kota-tahun-2004-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Karawang 2021*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2024). *Profil Kemiskinan Kabupaten Karawang Maret 2024* (BRS No. 1/07/3215/Th. I, 30 Juli 2024).



- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2014). *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur 2010-2024* [Leaflet].
- Brown, C., Shaker, R. R., & Das, R. (2018). A review of approaches for monitoring and evaluation of urban climate resilience initiatives. *Environment, Development and Sustainability*, 20(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s10668-016-9891-7>
- BPS-Statistics Indonesia Karawang Regency. (October 5, 2023). *Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2004-2022*. Retrieved on April 7, 2025, from <https://karawangkab.bps.go.id/en/statistics-table/1/Mjg1IzE=/indeks-kedalaman-kemiskinan-kab-kota-tahun-2004-2022.html>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3. ed., [Nachdr.]). SAGE Publ.
- D'Adamo, I., & Gastaldi, M. (2023). Monitoring the Performance of Sustainable Development Goals in the Italian Regions. *Sustainability*, 15(19), 14094. <https://doi.org/10.3390/su151914094>
- Daga, A. K., & Prasetyo, P. S. (2023). Inovasi dan Tantangan: Kendala Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji, Bandung. *Contemporary Public Administration Review*, 1(1), 74–92. <https://doi.org/10.26593/copar.v1i1.7073.74-92>
- Douxchamps, S., Debevec, L., Giordano, M., & Barron, J. (2017). Monitoring and evaluation of climate resilience for agricultural development – A review of currently available tools. *World Development Perspectives*, 5, 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2017.02.001>
- Hiwy, R. N., & Sholichah, N. (2023). *Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Desa Lelang Kabupaten Maluku Barat Daya*. 1(1).
- Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2019). *Program evaluation theory and practice: A comprehensive guide* (Second edition). Guilford Press.
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- OECD. (2025). *Implementation Toolkit for the OECD Recommendation on Public Policy Evaluation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/77faa4fe-en>
- Ofir, Z. (2013). Strengthening Evaluation for Development. *American Journal of Evaluation*, 34(4), 582–586. <https://doi.org/10.1177/1098214013497531>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (Eds.). (2010). *Quality Standards for Development Evaluation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264083905-en>
- Paundria S W, R. K., & Prasetyo, P. S. (2024). Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas Sukapakir Kota Bandung Menggunakan Perspektif Model CIPP. *Contemporary Public Administration Review*, 1(2), 40–60. <https://doi.org/10.26593/copar.v1i2.7710.40-60>



- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (Desember 28, 2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*.
- Peraturan Bupati Karawang. (2021). *Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang*. Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Ray Rist. (2019). *Program Evaluation and the Management of Government*. Routledge.
- Shah, A. (Ed.). (2020). *Policy, Program and Project Evaluation: A Toolkit for Economic Analysis in a Changing World*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-48567-2>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Van Drooge, L., & Spaapen, J. (2022). Evaluation and monitoring of transdisciplinary collaborations. *The Journal of Technology Transfer*, 47(3), 747-761. <https://doi.org/10.1007/s10961-017-9607-7>
- Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation* (1st paperback print). Transaction Publ.
- Wotela, K. (2017). Using systems thinking to conceptually link the monitoring and evaluation function within development interventions and public policy. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 13(1). <https://doi.org/10.4102/td.v13i1.398>